



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI PENGENDALIAN PROYEK BIDANG
SUMBER DAYA AIR MELALUI SISTEM INFORMASI
PENGENDALIAN PROYEK MENUJU PEKERJAAN
INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS
DI KOTA BEKASI**

NAMA : YUDIANTO, A.Ks, M.Si
N I P : 19711203 199203 1 005
N D H : 07

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Proyek Perubahan ini dilakukan untuk mengintegrasikan informasi terkait dengan pelaksanaan proyek infrastruktur yang terdapat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam sebuah aplikasi berbasis web sebagai instrumen pengendalian melalui **Sistem Informasi Pengendalian Proyek (SIDALPRO)**. Sebagai pilot project maka Proyek Perubahan baru akan dilaksanakan pada Bidang Sumber Daya Air dan pada tahap selanjutnya akan digunakan oleh seluruh bidang yang ada pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan selanjutnya akan diintegrasikan dengan aplikasi E-MONEV yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bekasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas berlangsungnya suatu kegiatan proyek yang dilakukan oleh para penyedia jasa konstruksi.

Sesuai dengan penerapannya aplikasi ini akan berkembang menjadi sumber informasi atas data yang secara rinci disajikan terkait dengan perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan, sedang dan sudah berjalan.

Tahapan Kegiatan meliputi 3 (tiga) jangka waktu, yaitu :

A. Tahapan Jangka Pendek (akhir April 2019):

1. Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan informasi dan data.
2. Terinputnya data pelaksanaan proyek bidang Sumber Daya Air Kota Bekasi
3. Tersedianya sumber data kegiatan proyek infrastruktur yang belum, sedang dan sudah terlaksana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

B. Tahapan Jangka Menengah (s/d akhir Desember 2019)

1. Terwujudnya Aplikasi/Sistem Informasi Pengendalian Proyek (SIDALPRO)
2. Terlaksananya pengendalian proyek infrastruktur di tingkat Dinas (Kadis, Sekdis, Kabid, Kasi dan Staf)
3. Tersedianya data informasi terhadap pekerjaan konstruksi untuk kepentingan audit baik internal maupun eksternal
4. Tersedianya data informasi kinerja penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi

C. Tahapan Jangka Panjang (tahun 2020 - seterusnya)

Tersedianya sumber informasi atas kegiatan proyek infrastruktur untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah